

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK / TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2013-2016**

**Arviyanti**

STIE Muhammadiyah Jakarta

**Enong Muiz**

STIE Muhammadiyah Jakarta

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak / *tax avoidance* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2016. Sampel yang digunakan sebanyak 15 perusahaan selama 4 tahun sehingga jumlah sampel sebanyak 60 data perusahaan. Analisis data yang digunakan adalah GLS (*General Least Square*) dengan bantuan Eviews versi 9. Untuk variabel independen, variabel karakteristik perusahaan diproksikan pada profitabilitas (*Return On Asset/ROA*), leverage (*Debt to Equity Ratio/DER*), ukuran perusahaan (*Size*), intensitas modal (*Capital Intensity Ratio/ CIR*). Variabel struktur kepemilikan diproksikan pada kepemilikan manajerial (OWNMANAG) dan kepemilikan institusional (OWNINS). Sedangkan untuk variabel dependen penghindaran pajak diproksikan pada tarif pajak efektif (*ETR/ Effective Tax Rate*). Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh karakteristik perusahaan yang di proksikan pada ROA, DER, Size, CIR hanya ROA yang berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak. DER dan Size berpengaruh negative tidak signifikan Sedangkan dan CIR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengaruh Struktur Kepemilikan yang diproksikan pada kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional berpengaruh negative tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** Penghindaran pajak (ETR), Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), Ukuran perusahaan (Size), Intensitas modal (Capital Intensity Ratio/ CIR), Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional.

**Abstract**

This study was conducted to determine empirical evidence of the influence of company characteristics and ownership structure on tax avoidance / tax avoidance in state-owned enterprises (SOEs) listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2013-2016. The samples used were 15 companies for 4 years so the total sample of 60 company data. Analysis of the data used is GLS (General Least Square) with the help of Eviews version 9. For independent variables, variable company characteristics are proxied on profitability (Return on Assets / ROA), leverage (Debt to Equity Ratio / DER), company size (Size) , capital intensity (Capital Intensity Ratio / CIR). The ownership structure variable is proxied to managerial ownership (OWNMANAG) and institutional ownership (OWNINS). As for the dependent variable tax avoidance is proxied at the effective tax rate (ETR / Effective Tax Rate). The results of this study are the influence of company characteristics which are proxied on ROA, DER, Size, CIR, only ROA which has a significant negative effect on tax avoidance. DER and Size have no significant negative effect, while and CIR have positive but not significant effect on tax avoidance. Effect of Proposed Ownership Structure on managerial ownership does not have a significant positive effect on tax avoidance and institutional ownership does not have a significant negative effect on tax avoidance.

**Keywords:** Tax avoidance (ETR), profitability (ROA), leverage (DER), company size (size), capital intensity (CIR), managerial ownership, institutional ownership.

## PENDAHULUAN

Sumber pendapatan Negara paling besar di peroleh dari penerimaan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak orang pribadi maupun badan karena pajak bersifat memaksa dan diwajibkan. Hasil Badan Pusat Statistik mengenai Realisasi Penerimaan Negara tahun 2013- 2016 dari pajak semakin meningkat. Dari tahun 2013 sebesar 1.077.307, 2014 sebesar 1.146.866, 2015 sebesar 1.240.419, sampai 2016 penerimaan berasal dari pajak sebesar 1.284.970 (milyaran rupiah).

Penerimaan pajak tersebut akan tetapi tidak sesuai dengan target yang di harapkan pemerintah dikarenakan masih banyaknya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban warga Negara dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dengan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional seperti yang tercantum pada Undang – Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang undang” yang telah mengalami perubahan atau amandemen terdapat pada pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang – undang”.

Segala macam upaya telah dilakukan pemerintahan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pada tahun 2010 pemerintahan Indonesia telah memberikan berbagai insentif di bidang perpajakan, antara lain:

Penurunan tarif PPh badan dari 28 % menjadi 25 % sebagaimana diamanatkan dalam UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1b&2a Pemberian keringanan tariff PPh badan 5 % lebih rendah dari tarif normal bagi perusahaan yang minimal 40 % sahamnya dimiliki oleh publik dalam UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2b Pelaksanaan amandemen undang-undang PPN (UU no 42 tahun 2009) yang secara umum lebih memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan meningkatkan daya saing bagi pengusaha Indonesia di luar daerah pabean Pemberian insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP) atas PPh, PPN dan bea masuk guna mendorong investasi dan kegiatan dunia usaha serta stabilisasi harga di dalam negeri (Kementerian Keuangan RI,2012)

Berdasarkan penelitian Wicaksono (2015) fakta yang terjadi di masyarakat adalah belum semua WP taat memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan Negara dari sumber pajak di nilai masih rendah. Tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang (UU) no 11 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah menilai bahwa banyak harta warga Negara Indonesia yang di tempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun non likuid. Kenyataannya tidak semua harta tersebut telah dilaporkan di dalam SPT tahunan oleh pemiliknya, bahkan mungkin banyak yang belum terungkap karena wajib pajak menghindari kewajiban membayar pajak. Penerbitan UU Nomor 11 Tahun 2016 tax amnesty penghapusan pajak menunjukkan telah terjadinya tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan tax heaven / perlindungan pajak. Pajak diasumsikan sebagai biaya karena mengurangi laba. Perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile dari pada perusahaan yang belum gopublic. Agar harga sahamnya meningkat, manajer go public akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi deviden yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin (Suandy,2014:5).

Salah satu cara yang digunakan adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak menunjuk kepada rekayasa tax affairs yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (Suandy,2014:7).

Berkaitan dengan pengindaran pajak diatas, secara umum terdapat dua jenis perlawanan yang sering di lakukan oleh wajib pajak atau masyarakat yang dapat menghambat dalam upaya pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011). Jenis perlawanan yang pertama adalah perlawanan pasif, yaitu perlawanan yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat, rumitnya sistem perpajakan untuk dipahami dan dijalankan, kurangnya sistem kontrol dan pelaksanaan pemungutan pajak. Jenis perlawanan yang kedua adalah perlawanan aktif yaitu semua usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk

menghindari pajak, baik yang bersifat Legal (tax avoidance) maupun yang bersifat ilegal/melanggar undang-undang (tax evasion). Apapun bentuk perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak tentu saja akan berimbas pada terhambatnya upaya pemungutan pajak yang akhirnya berujung pada tidak maksimalnya jumlah pajak yang bisa dikumpulkan.

Mengutip dari berita "Kontan.co.id (Rabu,16/09/2015) JAKARTA. Kewajiban formal wajib pajak Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya. Data Ditjen Pajak menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka itu jauh lebih rendah ketimbang tingkat kepatuhan 2014 yang mencapai 59,88%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama berkilah, data tersebut tidak bisa dibandingkan. Sebab, "Data tahun 2014 itu sudah sampai dengan Desember 2014. Sedangkan untuk tahun 2015 itu baru per 10 September," ujarnya, Selasa (15/9).

Tidak hanya itu, tingkat kepatuhan wajib pajak badan per 10 September 2015 baru sebanyak 49,74%. Walaupun masih tergolong minim, capaian ini lebih tinggi dari tahun 2014, sebesar 47,34%. Kenaikan, klaim Ditjen Pajak, disebabkan banyak wajib pajak badan yang mulai memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015.

Dan dari "CNN Indonesia (Jumat, 06/05/2016) Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasioan (PPh) hingga 30 April 2016 sebanyak 11,67 juta. Angka itu meningkat 13 persen dibandingkan dengan realisasi SPT periode yang sama tahun lalu 10,32 juta wajib pajak (WP). Namun jika dibandingkan dengan target 14,6 juta SPT yang ditetapkan DJP, realisasi pelaporan SPT pada tahun ini hanya 83,3 persen atau kurang 2,93 juta SPT. Dari 11,67 juta SPT yang terkumpul, wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjadi pelapor SPT terbanyak yakni 11,12 juta atau 95,28 persen. Tingkat kepatuhan WPOP meningkat 13,77 persen jika dibandingkan dengan realisasi pelaporan SPT tahn lalu 9,77 juta SPT. Statistik DJP menunjukkan, mayoritas WPOP melaporkan SPT secara elektronik melalui aplikasi e-filling. Tercatat jumlah SPT WPOP yang masuk melalui aplikasi e-filling sebanyak 7,69 juta atau 69 persen dari total SPT WPOP. Sedangkan sekitar 30,5 persen atau 3,39 juta SPT dilaporkan secara manual, dan sisanya sebanyak 38.121 SPT masuk melalui e-SPT. Sementara tingkat kepatuhan WP badan sejauh ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tercatat jumlah SPT yang dilaporkan WP badan hingga berakhirnya masa pelaporan SPT, 30 April 2016, hanya meningkat 1 persen, yakni dari 543.092 SPT pada 30 April 2015 menjadi 549.059 SPT. Angka itu menyumbang hanya 4,7 persen dari total SPT yang terkumpul. Sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan SPT untuk WP orang pribadi adalah 31 Maret setiap tahunnya, sedangkan untuk WP badan paling lambat 30 April. Namun karena permasalahan teknis sistem pelaporan online, untuk tahun ini DJP memperpanjang sebulan masa pelaporan SPT untuk WP orang pribadi menjadi sama dengan WP badan hingga 30 April 2016. Sebelumnya, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Mekar Satria Utama mengatakan target pelaporan SPT pada tahun ini sebanyak 14,6 juta SPT. Khusus untuk target pelaporan SPT via e-filling ditetapkan sebanyak 7 juta WP.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan karakteristik perusahaan berdasarkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap tax avoidance, diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan (ROA), leverage, ukuran perusahaan (size), capital intensity ratio.

Dalam penelitian Rosalia (2017) menyatakan profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Mahaputra (2016) menyatakan bahwa laba atas asset sebagai proxy dari profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Siregar (2016) menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, size berpengaruh signifikan, dan variable profitabilitas, capital intensity, inventory intensity tidak

berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Beberapa penelitian sebelumnya juga mencoba mengkaitkan struktur kepemilikan terhadap tax avoidance, diantaranya memfokuskan pada kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Menurut Utami (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Tendean menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi faktor terjadinya tax avoidance. Penghindaran pajak yang marak muncul di media masa terjadi antara lain pada perusahaan BUMN yang menurut masyarakat perusahaan BUMN/BUMD yang diduga tidak mungkin melakukan penghindaran pajak karena sudah diberi kepercayaan oleh Negara sebagai wajib pajak beresiko rendah berdasarkan PER 31/PJ/2010 serta SE 45/PJ/2012 yang menjelaskan atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 A umum sebagai fungsi BUMN/ BUMD yang ditunjuk sebagai pemotong / pemotong pajak.

Telaah penulisan ini ditujukan untuk melihat secara teoritis pelaksanaan Karakteristik perusahaan, Struktur Kepemilikan dalam upaya untuk mengetahui keterkaitan dengan pengindaran pajak yang memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan (ROA), leverage, ukuran perusahaan (size), capital intensity ratio.

#### **KAJIAN LITERATUR**

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak pada dasarnya adalah setoran rakyat kepada kas negara yang pada akhirnya juga akan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat sendiri. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa adanya kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membiayai keperluan negara (Mardiasmo, 2011).

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum pajak (1992) diungkapkan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 dan No 16 Tahun 2009 tentang KUP pasal 1 di jelaskan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewenang (agen) (Ardiansah, 2014). Teori agensi muncul ketika adanya hubungan kerja antara satu orang atau lebih (principal) memberi wewenang dan bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk menerima wewenang dan menjalankan perusahaannya (Jensen & Meckling (1976) dalam Astuti (2016). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori agency adalah teori yang muncul karena adanya kerjasama dimana ada pemberi wewenang dan penerima wewenang untuk mencapai tujuan bersama. Manajer berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik – baiknya sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang cukup signifikan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Disinilah mulai terjadi agency problem atau perbedaan kepentingan yang akan mendorong terjadinya penghindaran pajak. Masdupi (2005) dalam Mahadewi (2017) mengemukakan cara – cara untuk mengatasi masalah keagenan antara lain: (1) meningkatkan kepemilikan manajerial, (2) pendekatan pengawasan eksternal dan (3)

institutional investor sebagai monitoring agent. Untuk mengatasi atau meminimalisasi masalah agensi tersebut maka dilakukan 2 cara berikut ini (Arfan, 2016):

#### **Market Force**

Market force merupakan pemegang saham yang memiliki saham mayoritas. Melalui hak suara mayoritas maka diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberi tekanan kepada manager untuk bekerja dengan baik maupun mengganti manajemen yang dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan.

#### **Agency Cost**

Agency cost biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi agency problem sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari biaya insentif yang akan diberikan kepada manager untuk memaksimalkan harga saham.

Kirchler, Maciejovsky, dan Schneider (2002) berpendapat penghindaran pajak mengacu pada pengurangan pembayaran pajak dengan cara yang legal, misalnya melalui celah celah peraturan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan – pemotongan yang di perkenankan maupun manfaat hal – hal yang belum diatur dan kelemahan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2005 dalam Lestari 2015). Dari pengertian - pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya pengurangan / meminimalisir bahkan menghindari adanya pembayaran pajak tanpa melanggar hukum.

Dalam penelitian ini cara pengukuran penghindaran pajak menggunakan proksi ETR (Effective Tax Rate). ETR yang rendah menjadi indikator penghindaran pajak karena dengan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan dan dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan yang menjadikan ETR rendah. ETR dapat di rumuskan sebagai berikut (Jane Atari, 2016):

$$ETR (it) = (\text{Beban Pajak } it) / (\text{Laba Sebelum Pajak } it)$$

Setiap perusahaan mempunyai ciri khas perusahaannya masing masing, perusahaan besar cenderung akan melakukan perencanaan pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Surbakti,2012).

Setiap perusahaan mempunyai ciri khas perusahaannya masing masing, perusahaan besar cenderung akan melakukan perencanaan pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Surbakti,2012). Karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi variasi tarif pajak efektif antar perusahaan, seperti perusahaan yang melakukan pembiayaan lewat hutang akan menghasilkan pajak yang kecil (Brigham & Houston, 2011 dalam Hijriani,2014).

Karakteristik perusahaan yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### **Profitabilitas Perusahaan (ROA)**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memberikan imbalan kepada para pemiliknya adalah profitabilitas (Hartanto, 249,2013). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan baik dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah di tetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya (Kasmir,2016:114). Return On asset (ROA) merupakan salah satu ratio yang dapat mengukur profitabilitas perusahaan. ROA yang diukur melalui rasio dari laba sebelum pajak terhadap total

asset akan mengontrol dampak dari perubahan laba akuntansi (Gupta dan Newberry (1997) dalam Surbakti (2012).

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa ROA adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui total asset yang dimiliki perusahaan tersebut.

### **Leverage**

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan (kuriyah,2016). Husnan (2012) yang menyatakan bahwa rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutangnya.

Dari uraian diatas mengenai leverage dapat kita simpulkan bahwa leverage adalah rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar operasi perusahaan dibiayai dengan hutang.

### **Ukuran Perusahaan (size)**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain – lain (Hasibuan (2009) dalam Surbakti (2012)). Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Sebuah perusahaan yang ukuran / skalanya besar dan sahamnya tersebar luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi bisnis dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut di dukung oleh asset yang besar. Hal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan besar memiliki jumlah laba sebelum pajak yang besar dan memiliki insentif serta sumber daya yang lebih besar untuk melakukan manajemen pajak (Fitri anita, 2015). Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Sebuah perusahaan yang ukuran / skalanya besar dan sahamnya tersebar luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi bisnis dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut di dukung oleh asset yang besar. Hal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan besar memiliki jumlah laba sebelum pajak yang besar dan memiliki insentif serta sumber daya yang lebih besar untuk melakukan manajemen pajak (Fitri anita, 2015).

### **Capital Intensity Ratio**

Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Stickney dan MC Gee (1982) dalam Surbakti (2012) menjelaskan bahwa Capital intensity dapat dijelaskan sebagai rasio dari net property, plant and equipment terhadap total asset (dalam nilai buku). Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat deductible expense.

Variabel bebas terakhir yang di teliti dalam penelitian ini adalah Struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan suatu perusahaan atau prosentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal (Sanjaya,2017). Pendapat lain menurut Mei Yuniati, Kharis Raharjo, Abrar Oemar (2016) menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham adalah proposi kepemilikan manajemen, institusional dan kepemilikan publik dan struktur kepemilikan merupakan mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham. Komposisi pemegang saham terdiri dari kepemilikan pihak dalam (insider) dan kepemilikan pihak luar (outsider). Outsider dapat berupa institusi domestic, institusi asing, pemerintah, individu domestic maupun asing. Insider sering disebut dengan managerial ownership atau kepemilikan manajerial.

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan hanya mencakup kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional di karenakan dalam perusahaan BUMN di dominasi oleh kepemilikan pemerintah sehingga struktur kepemilikan yang memungkinkan melakukan atau tidak

melakukan penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

### **Kepemilikan Manajerial**

Pemegang saham internal adalah orang yang memiliki saham dan termasuk di dalam struktur organisasi perusahaan, yang artinya orang tersebut juga melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana operasi (manajer atau direksi) atau sebagai pengawas kegiatan operasi perusahaan (dewan komisaris) (Sanjaya,2017).

Sonya Majid (2016:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.

Kepemilikan Manajerial dihitung dengan rumus sebagai berikut Gideon (2005) dalam Mahadewi (2017):

$$\text{Kep.Manajerial (KM)} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki direksi@komisaris dan manajer}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

### **Kepemilikan Istitusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan perusahaan atas institusi oleh pihak luar perusahaan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi – institusi lain yang menjadi peningkatan pengawasan atas perusahaan tersebut. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain (Sanjaya,2017):

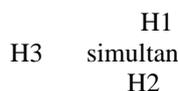
Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalaninformasi.

Memilik motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan

Kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham institusional dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam prosentase (Beiner et al (2003) dalam Mahadewi (2017)) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kep. institusional (KI)} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Berdasarkan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak serta berdasarkan kajian teoritis maupun penelitian-penelitian terdahulu maka dapat dibuat kerangka pemikiran seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran  
Sumber: Data Peneliti,2018

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini, semua variabel penelitian yaitu karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan diduga menjadi penyebab pengaruh secara positif terhadap variabel penghindaran pajak.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Terdapat Pengaruh Signifikan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak
- Terdapat Pengaruh Signifikan Leverage terhadap penghindaran pajak
- Terdapat Pengaruh Signifikan size terhadap penghindaran pajak

Terdapat Pengaruh Signifikan capital intensity ratio terhadap penghindaran pajak  
Terdapat Pengaruh Signifikan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak  
Terdapat Pengaruh negative signifikan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.  
Terdapat Pengaruh signifikan Profitabilitas, Leverage, size, capital intensity ratio dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama (simultan) terhadap penghindaran pajak.

## METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dimana jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Yaitu sebagai berikut:

- Seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013 – 2016 dan bukan merupakan perusahaan listing maupun delisting pada tahun penelitian.
- Perusahaan BUMN yang menerbitkan Laporan Tahunan secara rutin dari tahun 2013 – 2016.
- Perusahaan BUMN dengan pajak penghasilan positif antara tahun 2013 – 2016.
- Perusahaan BUMN yang memiliki kelengkapan data keuangan untuk tahun 2013 sampai dengan 2016 yang diperlukan untuk pengukuran keseluruhan variabel.
- Perusahaan BUMN yang menggunakan mata uang rupiah. Kriteria ini diperlukan agar pengukuran nilai mata uangnya sama.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel, sehingga data yang dimiliki tidak hanya berdasarkan satu periode saja tetapi mencakup beberapa periode. Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang digunakan yaitu: Pooled Least Square (Common Effect), Fixed Effect Model, Random Effect Model. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan 3 pendekatan yaitu Uji F Restricted (Chow Test), Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier (LM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Pada tabel xx dibawah ini disajikan deskripsi variabel – variabel penelitian yaitu ETR, ROA, DER, size, capital intensity, kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusi. Jumlah perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI sebanyak 15 sampel perusahaan dengan tahun pengamatan dari tahun 2013 – 2016 sehingga total sampel pengamatan sebanyak 60 data panel.

Tabel 1 Deskripsi Variabel Penelitian

VARIABEL	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	60	0,01	0,49	0,2563	0,10078
SIZE	60	9,64	15,02	13,4310	1,22593
ROA	60	0,00	0,59	0,0995	0,11290
DER	60	0,37	11,40	3,2118	2,97000
CIR	60	0,01	0,70	0,1855	0,21282
OWNMANAG	60	0,00	0,04	0,0008	0,00530
OWNINST	60	0,06	0,72	0,3480	0,13817

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa nilai minimum ETR (Effective Tax Rate) sebesar 0,01 dan maksimum sebesar 0,49. Sementara nilai standar deviasi ETR sebesar 0,10078 dengan nilai rata rata ETR yang dimiliki perusahaan BUMN periode 2013 -2016 adalah 0,2563. Nilai

terendah dimiliki oleh PT Timah (TINS) pada tahun 2015 dan yang tertinggi PT Adhi Karya (ADHI) pada tahun 2016.

Nilai minimum Size sebesar 9,64 dan maksimum sebesar 15,02. Sementara nilai standar deviasi Size sebesar 1,22593 dengan nilai rata rata Size yang dimiliki perusahaan BUMN periode 2013 -2016 adalah 13,4310. Nilai terendah dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) pada tahun 2013 dan yang tertinggi PT Bank Mandiri (BMRI) pada tahun 2016.

Nilai minimum ROA (Return On Aset) sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 0,59. Sementara nilai standar deviasi ROA sebesar 0,11290 dengan nilai rata rata ROA yang dimiliki perusahaan BUMN periode 2013 -2016 adalah 0,0995. Nilai terendah dimiliki oleh PT Jasa Marga (JSMR) pada tahun 2013 dan yang tertinggi PT Timah (TINS) pada tahun 2016.

Nilai minimum DER (Debt Equity Ratio) sebesar 0,37 dan maksimum sebesar 11,40. Sementara nilai standar deviasi DER sebesar 2,97000 dengan nilai rata rata DER yang dimiliki perusahaan BUMN periode 2013 -2016 adalah 3,2118. Nilai terendah dimiliki oleh PT Semen Indonesia (SMGR) pada tahun 2014 dan yang tertinggi PT Bank Tabungan Negara (BBTN) pada tahun 2015.

Nilai minimum CIR (Capital Intensity Ratio) sebesar 0,01 dan maksimum sebesar 0,70. Sementara nilai standar deviasi CIR sebesar 0,21282 dengan nilai rata rata CIR yang dimiliki perusahaan BUMN periode 2013 -2016 adalah 0,1855. Nilai terendah dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan (PTPP) pada tahun 2013, PT Bank Negara Indonesia (BBNI) pada tahun 2013&2014, PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2013,2014 dan 2015, PT Bank Tabungan Negara (BBTN) pada tahun 2013,2014 dan 2015, PT Bank Mandiri (BMRI) pada tahun 2013,2014 dan 2015 dan yang tertinggi PT Semen Indonesia (SMGR) pada tahun 2016.

Nilai minimum OWNMANAG (Owner Managemen) sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 0,04. Sementara nilai standar deviasi OWNMANAG sebesar 0,00530 dengan nilai rata rata OWNMANAG yang dimiliki perusahaan BUMN periode 2013 -2016 adalah 0,0008. Nilai terendah dimiliki semua perusahaan kecuali PT Bank Tabungan Negara (BBTN) pada tahun 2013 dan PT Pembangunan Perumahan (PTPP) pada tahun 2014 dan yang tertinggi PT Pembangunan Perumahan (PTPP) pada tahun 2014.

Nilai minimum OWNINST (Owner Institution) sebesar 0,06 dan maksimum sebesar 0,72. Sementara nilai standar deviasi OWNINST sebesar 0,13817 dengan nilai rata rata OWNINST yang dimiliki perusahaan BUMN periode 2013 -2016 adalah 0,3480. Nilai terendah dimiliki oleh PT Kimia Farma (KAEF) pada tahun 2013,2014,2015 dan yang tertinggi PT Bukit Asam (PTBA) pada tahun 2014.

Untuk memperjelas gambaran tiap – tiap variabel, berikut rata – rata variabel tiap periode:

TAHUN	ETR	SIZE	ROA	DER	CIR	OWNMANAG	OWNINST
2013	0,214519067	9,976702	0,076493	2,608668	0,133854	0,001104159	0,250966835
2014	0,214216146	10,03583	0,067909	2,610106	0,134267	0,002585144	0,274158764
2015	0,172636829	10,10174	0,080556	2,301066	0,144024	0,000496264	0,27036105
2016	0,166368321	10,17937	0,075031	2,114653	0,144017	0,000125409	0,249905392

Tabel 2 Rata – rata Variabel Penelitian Periode 2013-2016

Dari tabel diatas, terlihat bahwa nilai ETR mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Sedangkan yang mengalami kenaikan adalah Size dan CIR (Capital Intensity Ratio). Yang mengalami fluktuasi adalah variabel ROA, DER, OWNMANAG dan OWNINST.

### Hasil Pengolahan Data

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang digunakan (Nachrowi dan Usman 2006; Gujarati dan Porter, 2015), yaitu:

#### 1. Pooled Least Square (Common Effect)

Hasil olah data Pooled Least Square (Common Effect) menggunakan E-views versi 9 sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil olah data Pooled Least Square (Common Effect)

Dependent Variable: ETR

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/18 Time: 13:12

Sample: 2013 2016

Periods included: 4

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.386388	0.150276	2.571197	0.0130
ROA	-0.399904	0.132106	-3.027138	0.0038
DER	-0.005718	0.006473	-0.883470	0.3810
SIZE	-0.004004	0.011845	-0.338013	0.7367
CIR	-0.038143	0.087159	-0.437622	0.6634
OWNMANAG	3.883779	2.344475	1.656567	0.1035
OWNINST	-0.041040	0.100970	-0.406461	0.6860
R-squared	0.238323	Mean dependent var		0.256333
Adjusted R-squared	0.152095	S.D. dependent var		0.100776
S.E. of regression	0.092796	Akaike info criterion		-1.807537
Sum squared resid	0.456392	Schwarz criterion		-1.563197
Log likelihood	61.22612	Hannan-Quinn criter.		-1.711962
F-statistic	2.763877	Durbin-Watson stat		1.031885
Prob(F-statistic)	0.020619			

Sumber : Eviews versi 9, 2018

**2. Fixed Effect Model**

Hasil olah data Fixed Effect Model menggunakan E-views versi 9 sebagai berikut:  
Tabel 4 Hasil olah data Fixed Effect Model

Dependent Variable: ETR

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/18 Time: 13:18

Sample: 2013 2016

Periods included: 4

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.891793	0.942341	4.129922	0.0002
ROA	-0.519528	0.110714	-4.692521	0.0000
DER	0.022174	0.015094	1.469073	0.1498
SIZE	-0.278020	0.068388	-4.065349	0.0002
CIR	0.503975	0.278616	1.808853	0.0782
OWNMANAG	0.203365	1.704143	0.119336	0.9056
OWNINST	-0.041834	0.081227	-0.515027	0.6094

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.785060	Mean dependent var	0.256333
Adjusted R-squared	0.674835	S.D. dependent var	0.100776
S.E. of regression	0.057466	Akaike info criterion	-2.606037
Sum squared resid	0.128790	Schwarz criterion	-1.873016
Log likelihood	99.18110	Hannan-Quinn criter.	-2.319312
F-statistic	7.122315	Durbin-Watson stat	2.146457
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Eviews versi 9, 2018

**3. Random Effect Model**

Hasil olah data Random Effect Model menggunakan E-views versi 9 sebagai berikut:  
Tabel 5 Hasil olah data Random Effect Model

Dependent Variable: ETR

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/24/18 Time: 13:20

Sample: 2013 2016

Periods included: 4

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 60

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.724293	0.218753	3.311013	0.0017
ROA	-0.429297	0.103148	-4.161936	0.0001
DER	0.012757	0.007923	1.610158	0.1133
SIZE	-0.034900	0.016668	-2.093818	0.0411
CIR	0.101264	0.113225	0.894362	0.3752
OWNMANAG	1.208720	1.613019	0.749353	0.4570
OWNINST	-0.049622	0.076264	-0.650661	0.5181

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.066715	0.5741
Idiosyncratic random	0.057466	0.4259

Weighted Statistics

R-squared	0.254901	Mean dependent var	0.101394
Adjusted R-squared	0.170550	S.D. dependent var	0.075243
S.E. of regression	0.068527	Sum squared resid	0.248888
F-statistic	3.021916	Durbin-Watson stat	1.415563

Prob(F-statistic)	0.012913		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.069585	Mean dependent var	0.256333
Sum squared resid	0.557499	Durbin-Watson stat	0.631959

Sumber: Eviews versi 9, 2018

Setelah di dapat hasil pengolahan data menggunakan Eviews seperti 3 tabel diatas, selanjutnya akan dilakukan pemilihan model estimasi untuk mendapatkan pendekatan terbaik dalam analisis regresi data panel. Ada beberapa uji yang harus dilakukan antara lain:

1. Uji F Restricted (Chow Test)

Hasil Uji F Restricted (Chow Test)menggunakan E-views versi 9 sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji F Restricted (Chow Test)

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.085967	(14,39)	0.0000
Cross-section Chi-square	75.909955	14	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: ETR

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/18 Time: 13:24

Sample: 2013 2016

Periods included: 4

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.386388	0.150276	2.571197	0.0130

ROA	-0.399904	0.132106	-3.027138	0.0038
DER	-0.005718	0.006473	-0.883470	0.3810
SIZE	-0.004004	0.011845	-0.338013	0.7367
CIR	-0.038143	0.087159	-0.437622	0.6634
OWNMANAG	3.883779	2.344475	1.656567	0.1035
OWNINST	-0.041040	0.100970	-0.406461	0.6860
<hr/>				
R-squared	0.238323	Mean dependent var	0.256333	
Adjusted R-squared	0.152095	S.D. dependent var	0.100776	
S.E. of regression	0.092796	Akaike info criterion	-1.807537	
Sum squared resid	0.456392	Schwarz criterion	-1.563197	
Log likelihood	61.22612	Hannan-Quinn criter.	-1.711962	
F-statistic	2.763877	Durbin-Watson stat	1.031885	
Prob(F-statistic)	0.020619			

Sumber : Eviews versi 9, 2018

Dari hasil Uji F Restricted (Chow Test) cukup diperhatikan nilai probabilitas (Prob.) untuk Cross-section F. Jika nilai  $> 0,05$  (tingkat signifikan) maka model yang terpilih Common Effect (CE), tetapi jika  $< 0,05$  maka model yang terpilih Fixed Effect (FE). Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,0000 yang nilainya  $< 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model FE lebih tepat dibandingkan dengan model CE.

## 2. Uji Hausman

Hasil Uji Hausman menggunakan E-views versi 9 sebagai berikut:

**Tabel 7 Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.367580	6	0.0001

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
ROA	-0.519528	-0.429297	0.001618	0.0249
DER	0.022174	0.012757	0.000165	0.4636
SIZE	-0.278020	-0.034900	0.004399	0.0002
CIR	0.503975	0.101264	0.064807	0.1137
OWNMANAG	0.203365	1.208720	0.302272	0.0675
OWNINST	-0.041834	-0.049622	0.000782	0.7806

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: ETR

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/18 Time: 13:25

Sample: 2013 2016

Periods included: 4

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.891793	0.942341	4.129922	0.0002
ROA	-0.519528	0.110714	-4.692521	0.0000
DER	0.022174	0.015094	1.469073	0.1498
SIZE	-0.278020	0.068388	-4.065349	0.0002
CIR	0.503975	0.278616	1.808853	0.0782
OWNMANAG	0.203365	1.704143	0.119336	0.9056
OWNINST	-0.041834	0.081227	-0.515027	0.6094

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.785060	Mean dependent var	0.256333
Adjusted R squared	0.674835	S.D. dependent var	0.100776
S.E. of regression	0.057466	Akaike info criterion	-2.606037
Sum squared resid	0.128790	Schwarz criterion	-1.873016
Log likelihood	99.18110	Hannan-Quinn criter.	-2.319312
F-statistic	7.122315	Durbin-Watson stat	2.146457
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews versi 9, 2018

Dari hasil uji Hausman Test cukup diperhatikan nilai probabilitas (Prob.) untuk Cross-section random. Jika nilai  $> 0,05$  (tingkat signifikan) maka model yang terpilih Random Effect (RE), tetapi jika  $< 0,05$  maka model yang terpilih Fixed Effect (FE). Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai Prob.Cross-section random sebesar 0,0001 yang nilainya  $< 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model FE lebih tepat dibandingkan dengan model RE. Karena hasil pada uji Hausman Test memilih FE maka harus dilakukan uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data cross section. Karena regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka kemungkinan terjadi heteroskedastisitas. Model regresi data panel yang kemungkinan heteroskedastisitas adalah CE dan FE.

Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan E-views versi 9 sebagai berikut:

**Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dependent Variable: ETR

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 08/18/18 Time: 10:39

Sample: 2013 2016

Periods included: 4

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 60

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.747246	0.474479	5.790029	0.0000
ROA	-0.604385	0.072634	-8.321010	0.0000
DER	0.021657	0.003820	5.668863	0.0000

SIZE	-0.190533	0.035648	-5.344804	0.0000
CIR	0.377350	0.089570	4.212907	0.0001
OWNMANAG	0.334230	0.566998	0.589473	0.5589
OWNINST	-0.033221	0.011711	-2.836805	0.0072

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.925282	Mean dependent var	0.595109
Adjusted R-squared	0.886965	S.D. dependent var	0.712684
S.E. of regression	0.049740	Sum squared resid	0.096487
F-statistic	24.14812	Durbin-Watson stat	1.929475
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.767885	Mean dependent var	0.256333
Sum squared resid	0.139082	Durbin-Watson stat	2.019921

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

Dari hasil uji heteroskedastisitas tersebut diatas kemudian dibandingkan dengan hasil model FE.

**Tabel 9 Perbandingan Hasil FE Unweighted dan Weighted.**

Parameter	FE Unweighted	FE weighted
Prob. t-Statistic	2variabel <0,05 4variabel >0,05	5variabel <0,05 1variabel >0,05
R-squared	0,785060	0,925282
Prob(F-statistic)	0,00000	0,00000

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

Dari tabel tersebut, berdasarkan 3 parameter diatas dapat kita lihat perbedaan R-squarennya model FE weighted lebih besar (lebih baik) sehingga hasil yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah hasil terakhir / FE weighted.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ROA, SIZE, OWNINST berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak. DER & CIR berpengaruh positif signifikan. Sedangkan OWNMANAG, berpengaruh positif tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Dari hasil pengujian karakteristik perusahaan yang diprosikan pada ROA, DER, Size, CIR, dari variabel tersebut ROA, SIZE berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan DER & CIR berpengaruh positif signifikan.

### **Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak**

Dari hasil pengujian struktur kepemilikan perusahaan yang di proksikan pada kepemilikan manajemen memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan / tidak berpengaruh dan kepemilikan institusi berpengaruh negative signifikan.

Untuk kepemilikan manajerial, hasil penelitian ini menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak atau tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Atari (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan konsisten terhadap hasil penelitian Hadi (2014) dan Sari (2015) yang menyatakan kepemilikan manajerial didalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## PENUTUP

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan uji data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Pengaruh kareakteristik perusahaan yang di proksikan pada Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), Size, dan CIR. Variabel Profitabilitas (ROA) dan Size berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak. DER dan CIR berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Struktur Kepemilikan yang diprosikan pada kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan untuk peneliti – peneliti selanjutnya di bidang perpajakan, terutama untuk melihat tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan adalah:

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel dependen lain yang erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Contohnya political conection, undang undang pajak yang di berlakukan / reformasi pajak dan masih banyak lagi.

Peneliti selanjutnya di harapkan menambah rentan waktu dan jumlah perusahaan yang lebih banyak. Agar penelitian penghindaran pajak dapat tercover secara keseluruhan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ardyansah, Danis. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). Skripsi Universitas Diponegoro Semarang
- Astuti, Titiek Pujidan Y. Anni Aryani. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 03, September 2016: 375-388

- Arfan, M. Gardo. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi Universitas Bandar Lampung
- Atari, Jeane. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive: Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. JOM Fekon, Vol.3 No.1
- Hijriani, Anisa Nadia et.al. (2014). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI). Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan ISSN: 2088-0685 Vol.4, No.1, Pp 525-534.
- Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kuriah, Hanik Lailatul. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Vol.5, No.3, ISSN 2460- 0585
- Mahadewi, Istri Sri & Komang Ayu Krisna dewi. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Institusional dan Proporsi Dewan Komisaris Independen pada Manajemen Laba. E- Jurnal akuntansi Universitas Udayana Vol.18, No.1, Hal.443-470, ISSN: 2302-8556.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Rochmat, Soemitro, 1992. "Pengantar Singkat Hukum Pajak", Bandung: PT. Eresco
- Rosalia, Yuliesti & Sapari. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.6, No.3 ISSN: 2460-0585.
- Siregar, Rifka&Dini Widyawati. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Vol.5, No.2 ISSN 2460- 0585.
- Suandy, Erly. (2014). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Surbakti, Theresa Adelina. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur. Skripsi UI
- Utami, Nurindah Wahyu. (2013). Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size Profitabilitas Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Skripsi UNS
- Wicaksono, Agung Prasetyo Nugroho. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena Di Indonesia. Jurnal Ilmu Akuntansi vol 10 (1) P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007, dan No 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktorat Jendral Pajak. Sekretariat Negara: Jakarta.